

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis di era saat ini begitu cepat mengalami perubahan, sehingga perlunya pemerintah mengimbangi perkembangan bisnis yang ada dengan membuat regulasi yang bertujuan melindungi dan memberikan kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat dan juga Negara. Lembaga jaminan di Indonesia pun menghadapi kompleksitas dalam penerapan dan perkembangannya guna mendukung kegiatan bisnis, terkhusus kegiatan bisnis dibidang pertambangan yang merupakan penyokong sebagian besar pendapatan Negara. Dalam hal ini masih banyak pelaku bisnis dibidang pertambangan dan para praktisi hukum yang dapat dikatakan cacat prosedur menempatkan hasil pertambangan sebagai obyek jaminan fidusia dan menyimpangi persyaratan yang diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana kedepannya tentu akan berpotensi menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Terkait permasalahan yang ada tersebut, kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil pertambangan yang merupakan salah satu hak penguasaan Negara dapat dijadikan objek jaminan bagi pemegang IUP dan IUPK maupun IUPR yang menjadi *Legal Standing* bagi para pengusaha tambang untuk mengelola hasil pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Pasal 92 UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana perolehan Hak Milik atas Hasil Pertambangan tersebut terkait dengan keabsahan hasil pertambangan yang dapat diikat sebagai obyek jaminan khususnya jaminan fidusia.

Kata kunci : Fidusia, benda persediaan, obyek jaminan, hasil pertambangan

ABSTRACT

The development of business world in this current era are so rapidly changing, so the government needs to balance the development of existing business by creating regulations that aim to protect and provide legal certainty for the benefit of society and also the State. The guarantee institution in Indonesia also faces complexity in its application and its development to support business activities, especially business activities for mining which is a major contributor to the State's revenue. In this case, there are many business practitioners for mining and legal practitioners who defect the procedure by placing the results of mining as fiduciary objects and deviate the requirements in Law No.42 of 1999 on Fiduciary and Law No.4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, that can cause a loss to the parties which in the future will certainly have the potential to cause a loss to the parties. This research is a normative juridical research using legislation approach, and conceptual approach. Related to the existing problems, the conclusion of this research is that the result of mining which is one of the State control rights can be used as the object of guarantee for the holders of IUP and IUPK or IUPR that become Legal Standing for mining entrepreneurs to manage the mining results in accordance with applicable laws and regulations and comply with Article 92 of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, whereby the acquisition of Ownership of Mining Results are related to the legitimacy of mining proceeds which may be bound as an object of guarantee, especially fiduciary guarantee.

Keywords: Fiduciary, inventory, collateral objects, mining proceeds